



# **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS PANGAN TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2023**

*Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023*

## **LEMBAR VERIFIKASI**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua, telah diverifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2024 dan selanjutnya dapat diproses untuk disetujui dan disahkan oleh Walikota Bandar Lampung melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung.

**KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**I KADEK SUMARTA, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631125 198603 1 004

**MENGETAHUI/MENYETUJUI :**

**KEPALA BAPPEDA  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**VERIFIKATOR :**

**KEPALA BIDANG EKONOMI DAN  
SUMBER DAYA ALAM BAPPEDA  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Dr. KHAIIDARMANSYAH, SH., M.Pd.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631015 199001 1 002

**Dr.REIN SUSINDA HESTY S.Sos, M.Si**  
PEMBINA  
NIP. 19791013 200212 2 005



**BANDAR LAMPUNG**

**TAHUN 2023**

**DAFTAR ISI**

Halaman

**KATA PENGANTAR**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4 Sistematika Penulisan	I-6
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	II-1
	2,2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	II-4
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II-6
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	III-1
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	III-3
	3.3 Program dan Kegiatan	III-3
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	V-1

**LAMPIRAN**

1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
---	--

- Lingkup Kota Bandar Lampung Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Periode Pelaksanaan Triwulan IV (Desember Tahun 2021)
- 2 Table TC.33. Rumusan Rencana Kerja Program / Kegiatan Dinas Pangan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
  - 3 Tabel TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kota Bandar Lampung
  - 4 Data dan Informasi Capaian Kinerja perangkat Daerah Tahun 2021
  - 5 Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2017-2021  
Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2017-2021  
Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2017-2021



**LAMPIRAN 11**  
**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian

Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Pangan Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Pangan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.

6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pangan. Dengan demikian Dinas Pangan menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-4 (empat) dalam RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu ***‘Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.’*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Dinas Pangan menyusun Renja Tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Pangan Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan pada Tahun Anggaran 2022.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusun Renja Dinas Pangan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23);
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja Dinas Pangan dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pangan Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Pangan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pangan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun kedepan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Dinas Pangan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pangan tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pangan, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pangan

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kota Bandar Lampung pada Tahun lalu ( 2022), tahun berjalan ( 2023) dan tahun perkiraan capaian target Tahun 2024.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini program dan kegiatan tahun 2022 yang teralisasi beserta capaian kerjanya :

Pada Tabel 2. ( E.81) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Desember Tahun 2022 pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Total Anggaran Dinas Pangan tahun 2022 adalah Rp. 8.279.957.266,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.776.22.567,00 . Realisasi Capaian mencapai 96.61% ( sangat Tinggi) dengan rincian sebagai berikut:

**1)PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Total anggaran Rp. 34.386.900,00 realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100 % tetap realisasi keuangan masih Rp. 29.530.400,00 atau sebesar 85.88%

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik telah mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan kegiatan telah mencapai 92.67% atau sebesar Rp.2.764.415.097,00 dari Rp. 2.983.173.998,00

2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD telah terealisasi sebesar Rp.62.530.000,- atau sebesar 92%

**c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor, realisasi fisik sebesar 100% keuangan sebesar Rp.2.440.000,- atau sebesar 99 %
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi fisik sebesar 100 % realisasi keuangan sebesar Rp.10.853.500,- atau sebesar 99.95%
3. Penyediaan Bahan logistik Kantor, realisasi fisik sebesar 100% keuangan sebesar Rp.4.500.000,- atau sebesar 90%
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan , realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp.12.322.350,- atau sebesar 99%
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Udangan, realisasi realisasi fisik sebesar 100% , realisasi keuangan sebesar Rp.2.340.00,- atau sebesar 100%
6. Fasilitas Kunjungan Tamu realisasi keuangan sebesar Rp. 10.100.000,- atau 87.83%
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi realisasi fisik 100 % realisasi keuangan 99.46%

**d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak dianggarkan tahun 2022
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi keuangan 308.000.000,- atau sebesar 85.85%

**e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.579.510 ( 86.53%)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan realisasi keuangan Rp.100.826.500,- atau 96.35%

**2) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

**a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan realisasi keuangan Rp.39.427.400,- atau sebesar 89.57%
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya realisasi keuangan Rp. 2.412.500,- atau sebesar 7.83%
3. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan realisasi keuangan Rp.136.469.000,- atau sebesar 96.51%

**b. Pengelolaan Keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota**

1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.3.699.956.920,- atau sebesar 100%.

**c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**

1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun, realisasi keuangan Rp.28.237.000,-atau sebesar 81.65%
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, realisasi fisik 100 % realisasi keuangan Rp.185.717.100,-atau sebesar 80.69%

**3)PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

**a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**

- 1.Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, realisasi keuangan Rp.43.785.300,-atau sebesar 89.36%

**b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup satu wilayah dalam kabupaten/kota, realisasi keuangan Rp. 30.412.500 %, realisasi fisik 100% telah dilaksanakan pembagian beras yang berasal dari stock cadangan pangan kota bandar Lampung sebesar 24 ton kepada masyarakat kota bandar lampung di daerah rawan pangan

**4) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

**a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan Rp. 10.976.600 ,- atau sebesar 15.58%,realisasi kegiatan 100%
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, Rp.69.772.100,- atau sebesar 89.96%,realisasi kegiatan 100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dalam rangka mendukung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs Tujuan SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam Renstra 2021-2026

Beberapa aspek pelayanan OPD yang menjadi perhatian dalam pencapaian tujuan Renstra Dinas pangan yaitu :

**1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** sebagai indikator pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat . Pada tahun 2022 skor PPH kota bandar lampung berada pada level 88.2 melebihi target PPH 2022 86.2. Melalui sosialisasi Pemafaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga diharapkan dapat mendukung tercapainya “Zero kelaparan” di kota bandar lampung

### **2. Penanganan Daerah Rawan Pangan**

Penanganan Daerah Rawan Pangan membutuhkan data yang melibatkan kerjasama antar instansi dalam menentukan kebijakan mengenai penangannan daerah daerah yang rawan dan rentan pangan agar tepat sasaran. Saat ini peta rawan pangan kota bandar

lampung dalam proses penyusunan, diharapkan dengan adanya peta tersebut dapat memberikan arah kebijakan di masa mendatang di kota bandar lampung. Untuk mengatasi rawan pangan dan inflasi pada tahun 2022 diadakan pembagian beras ke 20 kecamatan total sebesar 320 ton

### **3. Pengawasan Keamanan Pangan**

Pengawasan keamanan pangan di kota bandar lampung saat ini sudah berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan secara rutin dan pembinaan pasar sehat dan aman dengan bekerjasama dengan BPOM berhasil meraih penghargaan tingkat Nasional.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengawasan keamanan pangan antara lain:

- Keterbatasan peralatan dan SDM yang ahli dan kompeten di bidang PMHP (pengawasan mutu hasil pertanian).
- masih banyak produk pangan segar beredar di masyarakat
- yang belum memiliki standar keamanan
- lemahnya sanksi hukum bagi pelaku usaha yang mengabaikan keamanan pangan
- sertifikasi PSAT ( pangan segar asal Tumbuhan)

untuk memenuhi pelayanan registrasi PSAT telah dibangun loket khusus untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha

### **4. Stabilisasi pasokan , distribusi dan harga pangan**

Dinas Pangan pangan juga melakukan pemantauan berkala ke pasar dan gudang gudang sembako yang terdapat di kota Bandar lampung, hingga saat ini dapat dikatakan belum pernah ada indikasi kelangkaan pangan di kota bandar lampung. Keterbatasan jumlah pasokan dan harga pangan masih terikat oleh kondisi iklim/curah hujan. Kelangkaan produk tertentu seringkali disebabkan oleh ulah oknum tertentu, oleh karena itu perlu pengawasan secara berkala harus terus

## **5. Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan (*food availability*) yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini menurut para ahli Hanani (2012), diharapkan mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Dengan adanya pengertian ketersediaan pangan tersebut dapat dikatakan jika dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun, sehingga membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup, yang tentunya akan memerlukan upaya dan sumber daya untuk memenuhinya. Ketersediaan pangan pemerintah walaupun pada tahun ini pengadaan pangan sebesar 320 ton, ( melebihi target ) berkaitan dengan isu inflasi maka stok cadangan pangan pemerintah hingga akhir 2022 habis dibagikan ke masyarakat

### **2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Adapun yang menjadi Visi Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 adalah:

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Dinas Pangan kota Bandar Lampung mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan

produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sejalan dengan visi propinsi Lampung “**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. dan Merujuk pada Misi 5 propinsi Lampung, tujuan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan swasembada pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Selain itu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah juga mendukung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*). Adapun tujuan SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selain itu pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi domestik. Dalam kerangka demikian upaya mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitasnya (penyediaan dari produksi domestik) identik pula dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dalam pembangunan pertanian beserta kebijakan pendukung lain yang terkait. Strategi umum pembangunan pertanian adalah memajukan agribisnis, yaitu membangun secara sinergis dan harmonis aspek-aspek: (1) industri hulu pertanian yang meliputi perbenihan, input produksi lainnya dan alat mesin pertanian; (2) pertanian primer (on-farm); (3) industri hilir pertanian (pengolahan hasil); dan (4) jasa-jasa penunjang yang terkait. Mengingat bahwa pelaku utama agribisnis adalah petani dan pengusaha dan tanpa adanya insentif pendapatan mereka akan enggan menekuni agribisnis maka kata kunci dalam meningkatkan kinerja sektor ini adalah menciptakan insentif ekonomi yang menunjang daya tarik agribisnis. Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Pangan dapat berperan aktif dalam upaya peningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya.

Visi Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 adalah:

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Dinas Pangan kota Bandar Lampung mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

**Misi** Kementerian Pertanian periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada tugas, fungsi dan wewenang dalam peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka misi Kementerian Pertanian adalah:
2. Mewujudkan Kesejahteraan Petani, adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan, adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan masyarakat.

4. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.

**Tujuan** dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan daya saing pertanian
3. Mengembangkan inovasi IPTEK pertanian
4. Berkembangnya sarana prasarana pertanian yang bernilai ekonomi
5. Mengembangkan sistem perkarantina pertanian
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan petani
7. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **1. Tujuan**

Tujuan RENJA Dinas pangan Kota Bandar Lampung mengacu pada Tujuan RENSTRA Dinas Pangan 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan”**

#### **2. Sasaran**

1. Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan
2. Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi dan Seimbang
3. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar Program dan Kegiatan

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja yang dituangkan kedalam program dan kegiatan tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas pangan Kota Bandar Lampung guna mewujudkan Visi Walikota Bandar Lampung

**“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis BerbasisEkonomi UntukKemakmuran Rakyat”** adalah sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

**1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1.4.1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Udangan

1.4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

**1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1.6.1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

## **2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

### **2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

- 2.1.1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- 2.1.2. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- 2.1.3. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

### **2.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**

- 2.3.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- 2.3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

## **3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

### **3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**

- 3.1.1. Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

### **3.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- 3.2.1. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup satu wilayah dalam kabupaten/kota

## **4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

### **4.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

- 4.1.1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan terdiridari 4 (empat) program dan 24 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut tersebar di beberapa lokasi di wilayah Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada table T-C.33 berikut :

## **BAB IV PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana kerja (Renja) 2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rancangan Awal Rencana kerja (Renja) 2024 Dinas Pangan adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Pangan Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Rencana kerja (Renja) 2024 selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 bagi seluruh jajaran Dinas Pangan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pangan dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

**EVA DWIANA**



**Tabel.2**  
**Formulir E.81**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung**  
**Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan Kota Bandar Lampung**  
**Periode Pelaksanaan Triwulan I s.d Triwulan IV ( Des Tahun 2022)**

Indikator Dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Sasaran RKPD : Kota Bandar Lampung

NO	SASARAN	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022) sd TRIWULAN IV	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 sd TRIWULAN IV(%).	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022(%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN							1	II	III	IV																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=14%/100	16=14+8	17=16/7*100	18																			
						Tolak Ukur	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	% (Rp)														
						Tanpa (Zero) kelaparan di kota bandar Lampung ( no hungry)	%	100																												
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	nilai	98	31,623,492,123	74,8 (BB)	6,579,230,766	98	8,049,801,268	653,915,894	46	1,390,331,682	-	-	97,657,650	7,776,615,517	0%	97%	14,355,882,2830	45,40%	Dinas Pangan											
		2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	memenuh kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang	98	31,623,492,123		3,096,695,883	98	3,750,753,143	653,915,894	30	1,347,452,432	-	-	40	8,645,400	100	3,461,384,997	92%	92%	100	3,461,384,997	102%	102,04%	Dinas Pangan							
		2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	%	100	411,025,687			100	34,386,900	50	20	20,885,000			30	8,645,400	100	29,530,400	100%	86%	100	29,530,400	100%	7,18%	Dinas Pangan						
		2	09	01	2.01	01	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Kegiatan Dinas	dokumen	36		6	18,082,700		34,386,900							8,645,400		29,530,400		86%		29,530,400		16,67%	Dinas Pangan					
							Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	36				6		3		1						6		100%		6		17%							
		2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuangan OPD yang akurat	%	100	50,706,884,815			100	3,050,533,998	30,00	495,946,194							93	2,826,975,097	98%	93%	93	2,826,975,097	93%	92,67%	Dinas Pangan					
		2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota	kali	14		14	2,672,643,953		2,983,173,998.00		495,946,194						1,217,280,832		555,241,877		14	495,946,194		14	2,764,415,097	93%	93%	5,747,589,095.0	11,51%	Dinas Pangan
							jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	31			31	2,672,643,953		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	100%				
		2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	dokumen	12		11	61,910,000		67,360,000								15,150,000		10,100,000			37,310,000		62,560,000		93%		124,470,000	16,12%	Dinas Pangan
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	dokumen	200			40		12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20%	
		2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuh kebutuhan Dasar operasional OPD	%	98	818,345,152			98	120,566,945	30	14,491,200	10	12,322,350					98	118,605,850	98%	98%	98	118,605,850	100%	14,49%	Dinas Pangan					
		2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor	paket	6		1	2,441,295		1	2,441,295							1	2,440,000	100%	100%	1	2,440,000	100%	100%	1	2,440,000	17%	16,67%	Dinas Pangan	
		2	09	01	2.06	02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor	paket	6		1	10,903,500		1	10,903,500							1	10,853,500	100%	100%	1	10,853,500	100%	100%	1	10,853,500	17%		Dinas Pangan	
		2	09	01	2.06	03	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	6		1	5,000,000		1	5,000,000							1	4,500,000	100%	90%	1	13,935,000	17%	16,67%	Dinas Pangan					



NO	SASARAN	KODE REKENING				PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022) sd TRIWULAN IV	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 sd TRIWULAN IV(%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022(%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN							I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=14/9*100	16=14+8	17=16/7*100	18									
						Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari	72,22		72,14	72,16			68,00	-	94%	68	-	94%	94,16%	Dinas Pangan					
						capaian skor PPH		87		85,5	86,2			88,20	-	103%	88	-	101%	101,38%	Dinas Pangan					
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	110	2.547.315.175	42.820.000	98	275.428.125	100	31.065.000		100%	65%	100	221.128.900	91%	90,91%	Dinas Pangan				
2	09	03	2.01	01	Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	6		1							1			17%						
						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	5	542.658.494	42.820.000	1	44.020.000		31.065.000			1	39.427.400		82.247.4000	15,16%	Dinas Pangan				
2	09	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen	6												0%						
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	6	379.688.357	-	1	30.800.000					2.412.500		0%	8%	0	2.412.500,00	0,64%	Dinas Pangan		
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	6		1								1		17%						
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan	5	1.624.967.801	103.700.000	1	200.608.125		11.500.000			124.969.000		136.469.000		240.169.000,00	14,78%	Dinas Pangan			
						Pasokan dan Harga Pangan	laporan	5			1						1		100%	68%	1	20%				
2	09	03	2.02		Pengelolaan keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota	persentase cadangan pangan pemerintah ( per 100 ton)	%					3.700.000.000				320	3.699.956.920		320	3.699.956.920	100%	3.699.956.920,00				
3	09	03	2.02	04	Pengadaan Cadangan pemerintah Kabupaten/Kota	penambahan jumlah cadangan pangan pemerintah	ton	50													0%					
						jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	50	580.191.281			320	3.700.000.000				320	3.699.956.920		3.699.956.920	63,71%	640%	Dinas Pangan			
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi ( angka kecukupan gizi)	skor	87	239.695.314		86	34.620.000					88,20	#REF!	#REF!	#REF!	88	#REF!	101%	101,38%	Dinas Pangan	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita	dokumen	6	239.695.314		1	4.731.000	1	34.620.000		26.955.000		1.312.000		28.267.000		32.998.000,00	13,77%	Dinas Pangan		
						Pangan per kapita	dokumen	6		1							1		100%	82%	1	17%				
2	09	03	2.04	02	Pembinaan masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya kegiatan pameran		2		2											2	100%				
						Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota sander lampung		1	1.098.637.178	76.431.000		230.156.000			20.142.000		165.575.100		185.717.100		262.148.100,00	23,86%	Dinas Pangan			
						sosialisasi dan pembinaan penggerakragaman		2		2											2	100%				
						jumlah pemberdayaan kelompok	laporan	12			2							2		100%	81%	2	17%			
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		3%	5			7	149.000.000						142.267.900	0%	95%	0	142.267.900,00			Dinas Pangan	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang dibuktikan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang dibuktikan	dokumen	2	333.293.728		1	49.000.000			19.250.000		24.535.300	1	43.785.300	89%	89%	1	74.285.300	50%	50,00%	Dinas Pangan
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	dokumen	2	333.293.728	30.500.000	1	49.000.000		19.250.000		24.535.300		43.785.300			1	74.285.300,00	22,29%	Dinas Pangan		
						Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	2			1			1			1		100%	89%	1	50%				
2	09	04	2.02		Kegiatan penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota	persentase daerah rawan dan rentan pangan yang tertangani	%	100			100	100.000.000		98	98.482.600		98	98.482.600	98%	98%	98	98.482.600,00	98%		Dinas Pangan	

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2021)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022) sd TRIWULAN IV	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 sd TRIWULAN IV(%).	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB								
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						I	II	III	IV			14=10+11+12+13	15=14/9*100	16=14+8	17=16/7*100		18							
1	2	3	09	04	2.02	02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyerahan Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan Yang mencakup 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyerahan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu)	ton	1					1	98,482,600	1	98,482,600	98%	98%	1	98,482,600	100%	100,00%	Dinas Pangan					
		2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	%	88	960,600,136.95				85.5	140,000,000	-				85.5	80,748,700	100%	58%	86	80,748,700	97%	8,41%	Dinas Pangan	
		2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern	%	88	960,600,136.95				85.5	140,000,000	-	42,120,000			56,972,100	85.50%	58%	86	129,280,700	97%	97,16%	Dinas Pangan		
		2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jumlah pelaku usaha yang dilatih dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi maupun belum	pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)	75		75											75		100%	12,50%	Dinas Pangan			
								Kelembagaan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota yang	dokumen	6																17%				
		2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	pasar	8		16												16		200%				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	dokumen	1	484,466,240				1	70,000,000	1	12,800,000			56,972,100	1	69,772,100	100%	100%	1	106,077,100	100%	21,90%	
										<b>Jumlah Total Anggaran Seluruh Program</b>							<b>8,049,801,268</b>													
										<b>Total capaian Kinerja dan anggaran dari seluruh program</b>																				
										<b>Predikat Kinerja dari seluruh program</b>																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berikutnya*):																														

Catatan :Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Interval	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja
91% < 100%	Sangat Tinggi
76% < 90%	Tinggi
66% < 75%	Sedang
51% < 64	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Bandar Lampung, Januari 2023  
KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG

**I KADEK SUMARTA, S.SOS., M.M.**  
NIP.19631125 198603 1 004

TABEL TC.33  
RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM / KEGIATAN DINAS PANGAN TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME) KEGIATAN ( OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	2024			2025			Catatan Penting
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 6,229,246,688.00			Rp 6,540,709,022.40		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				Rp 6,229,246,688.00			Rp 6,540,709,022.40		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan		98%	Rp 3,846,246,688.00		98%	Rp 3,977,709,022.40		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas		100%	Rp 60,000,000.00		100%	Rp 60,000,000.00		
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas pangan	6 dokumen (RKA ,Renstra RENJA., LKIP, LPJ, LPPD)	Rp 60,000,000.00	APBD	6 dokumen (RKA ,Renstra RENJA., LKIP, LPJ, LPPD)	Rp 60,000,000.00	APBD	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuanga OPD yang akuntabel		100%	Rp 3,149,558,259.00		100%	Rp 3,149,558,259.00		
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas pangan	32orang	Rp 3,036,038,259.00	APBD	32orang	Rp 3,036,038,259.00	APBD	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas pangan	1 dokumen	Rp 98,520,000.00	APBD	1 dokumen	Rp 98,520,000.00	APBD	
2.09.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas pangan	1laporan	Rp 15,000,000.00	APBD	1laporan	Rp 15,000,000.00		
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		30%	Rp 30,030,446.00		30%	Rp 48,492,780.40		
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas pangan	1 dokumen	Rp 15,000,000.00	APBD	1 dokumen	Rp 15,000,000.00		
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas pangan	4 orang	Rp 30,030,446.00	APBD	2 orang	Rp 33,492,780.40	APBD	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD		98%	Rp 132,832,150.00		98%	Rp 157,832,150.00		
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas pangan	1 paket	Rp 5,000,000.00	APBD	1 paket	Rp 5,000,000.00	APBD	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas pangan	1 paket	Rp 25,000,000.00	APBD	1 paket	Rp 25,000,000.00	APBD	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas pangan	1 paket	Rp 15,000,000.00	APBD	1 paket	Rp 15,000,000.00	APBD	

2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas pangan	1 paket	Rp 22,332,150.00	APBD	1 paket	Rp 22,332,150.00	APBD	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas pangan	1 paket	Rp 2,500,000.00	APBD	1 paket	Rp 2,500,000.00	APBD	
2.09.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu	Dinas pangan	1 laporan	Rp 13,000,000.00	APBD	1 laporan	Rp 13,000,000.00	APBD	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas pangan	1 laporan	Rp 50,000,000.00	APBD	1 laporan	Rp 75,000,000.00	APBD	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan Inventaris		98%	Rp 25,000,000.00		98%	Rp 110,000,000.00		
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas pangan	1 unit	Rp 25,000,000.00	APBD	1 unit	Rp 35,000,000.00	APBD	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka	Dinas pangan	1 unit	Rp -		1 unit	Rp 75,000,000.00	APBD	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD		98%	Rp 300,000,000.00		98%	Rp 303,000,000.00		
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas pangan	1 laporan	Rp 12,000,000.00	APBD	1 laporan	Rp 15,000,000.00	APBD	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas pangan	1 laporan	Rp 288,000,000.00	APBD	1 laporan	Rp 288,000,000.00	APBD	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang Terpelihara		98%	Rp 148,825,833.00		98%	Rp 148,825,833.00		
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas pangan	1 unit	Rp 33,456,705.00	APBD	1 unit	Rp 33,456,705.00	APBD	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas pangan	16 unit	Rp 115,369,128.00	APBD	16 unit	Rp 115,369,128.00	APBD	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH		skor 86.5	Rp 2,103,000,000.00		skor 86.5	Rp 2,228,000,000.00		
		Ketersediaan Pangan Utama		102%			102%			
		Ketersediaan energi per kapita		2520kkal/Kap/hari			2520kkal/Kap/hari			
		Ketersediaan protein per kapita		72,18 gram/kapita/hari			72,18 gram/kapita/hari			
		pencaapaian skor PPH		86.50			86.50			
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			98%	Rp 273,000,000.00		98%	Rp 298,000,000.00		
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 48,000,000.00	APBD	1 laporan	Rp 48,000,000.00	APBD	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 50,000,000.00	APBD	1 laporan	Rp 50,000,000.00	APBD	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		1 dokumen	Rp 75,000,000.00	APBD	1 dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD	
2.09.03.2.04.02	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti ketahanan pangan keluarga	Bandar Lampung	30 keluarga	Rp 100,000,000.00	APBD	30 keluarga	Rp 100,000,000.00	APBD	

2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			100%	Rp 1,600,000,000.00		100%	Rp 1,700,000,000.00		
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	320ton	Rp 1,600,000,000.00	APBD	120 ton	Rp 1,700,000,000.00	APBD	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi ( angka kecukupan gizi)		skor 86,5	Rp 230,000,000.00		skor 86,5	Rp 230,000,000.00		
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	APBD	1 dokumen	Rp 60,000,000.00	APBD	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 180,000,000.00	APBD	1 laporan	Rp 230,000,000.00	APBD	
2.09.04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>persentase daerah Rawan Pangan</b>		<b>6%</b>	<b>Rp 150,000,000.00</b>		<b>6%</b>	<b>Rp 160,000,000.00</b>		
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	persentase pemutakhiran peta analisis peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan		100%	Rp 50,000,000.00		100%	Rp 60,000,000.00	APBD	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan Pangan dan kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	APBD	1 dokumen	Rp 60,000,000.00	APBD	
2.09.04.2.02	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota			<b>87%</b>	Rp 100,000,000.00		<b>87%</b>	Rp 100,000,000.00		
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 100,000,000.00	APBD	1 laporan	Rp 100,000,000.00	APBD	
2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar</b>		<b>87%</b>	<b>Rp 130,000,000.00</b>		<b>87%</b>	<b>Rp 175,000,000.00</b>		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern		87%	Rp 130,000,000.00		87%	Rp 175,000,000.00		
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	kelembagaan kewanaman pangan Segar Daerah Kabupaten /kota yang dibina	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	APBD	1 dokumen	Rp 75,000,000.00	APBD	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 80,000,000.00	APBD	1 dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD	
	<b>Total Belanja</b>				<b>Rp 6,229,246,688.00</b>			<b>Rp 6,540,709,022.40</b>		-

Bandar Lampung, Januari 2023  
KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG

**I KADEK SUMARTA, S.SOS., M.M.**  
NIP.19631125 198603 1 004

**Tabel.TC 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023**  
**Kota Bandar Lampung**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pangan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME) KEGIATAN ( OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM ( RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 )	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN (n-3) TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 ( RENJA PADA TAHUN BERJALAN )	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s.d TAHUN BERJALAN ( TAHUN -1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=7/8*100	10	11=6+8+10	12=11/5*100
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan		98		98	99	101%	98	98	100%
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	100		100	100	100%	100	100	100%
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas pangan	dokumen (RKA ,Renstra RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	36	6						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	36		6	6	100%	6	12	33%
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuangan OPD yang akurat	%	100		100	98	98%	100	99	99%
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kali	84	14						
						Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31		31	31	100%	30	29	94%
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	Bulan	72	10						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	200		40	40	100%	40	80	40%
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD	%	98		98	98	100%	98	98	100%

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME) KEGIATAN ( OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM ( RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 )	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN (n-3) TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 ( RENJA PADA TAHUN BERJALAN )	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN s.d TAHUN BERJALAN ( TAHUN -1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=7/8*100	10	11=6+8+10	12=11/5*100
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah sarana listrik/penerangan bangunan kantor	paket	5							
						jumlah paket Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	5							
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	paket	5							
						jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	5		1	1	100%	1	2	40%
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penyediaan makanan dan minuman rapat	%	100	100						
						jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	6	1	1	1	100%	1	3	50%
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket	6	1						
						jumlah paket barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket	6		1	1	100%	1	3	50%
2	09	01	2.06	06	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	6	1						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	6		1	1	100%	1	3	50%
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan dan minuman tamu	%	100	100						
						Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6		1	1	100%	1	3	50%
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	partisipasi dalam rapat konsultasi luar daerah	%	100							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5			2	40%	1	3	60%
2	09	01	2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100					98	49	49%
1	09	01	2.06	05	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan mebeuler kantor	paket	2							
						jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2				1	1	2	100%
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peratatan dan Mesin Lainnya	tersedianya komputer/pc/neotebookprinter	paket	2							
						jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2			1	100%	1	2	100%
2	09	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD	%	98		98	98	100%	98	98	100%
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	paket	5	1						
						jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	5	1				1	2	40%

URUSAN	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME) KEGIATAN ( OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM ( RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 )	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN (n-3) TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 ( RENJA PADA TAHUN BERJALAN )	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN	
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s.d TAHUN BERJALAN ( TAHUN -1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=7/8*100	10	11=6+8+10	12=11/5*100
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	bulan	72	10						
						jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	5		1	1	100%	1	2	40%
2	09	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Inventaris kantor yang Terpelihara</b>	%	<b>98</b>		<b>98</b>	90	<b>92%</b>	98	<b>94</b>	<b>96%</b>
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	%	100	1						
						jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	1		1	1	100%	1	1	100%
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	%	16	16						
						jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	16		16	16	100%	16	16	100%
						<b>Skor PPH</b>	skor	<b>87</b>		86.2	88.20	<b>102%</b>	86.2	<b>87</b>	100%
2	09	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>									<b>0</b>	
						<b>Ketersediaan Pangan Utama</b>	%	<b>110</b>	98	<b>98</b>	100	<b>102%</b>	100	<b>100</b>	91%
						<b>Ketersediaan energi per kapita</b>	kkal/Kap/hari	<b>2540</b>	2,490	<b>2500</b>	3,096	<b>124%</b>	2,510	<b>2803</b>	110%
						<b>Ketersediaan protein per kapita</b>	gram/kapita/hari	<b>72.22</b>	60	<b>72.14</b>	68.00	<b>94%</b>	72.16	<b>70</b>	97%
						<b>pencapaian skor PPH</b>		<b>87</b>	85,40	<b>85.5</b>	88.20	<b>103%</b>	86.20	<b>87</b>	100%
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<b>Ketersediaan Pangan Utama</b>	%	<b>110</b>		<b>98</b>	102	<b>104%</b>	98	<b>100</b>	91%
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	6	1						
						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan	5		1	1	100%	1	2	40%
2	09	03	2.01	03	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok	data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen	6	0						

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME) KEGIATAN ( OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM ( RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 )	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN (n-3) TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 ( RENJA PADA TAHUN BERJALAN )	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s.d TAHUN BERJALAN ( TAUN -1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=7/8*100	10	11=6+8+10	12=11/5*100
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	5		1	-	0%	1	0	0%
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	6	1						
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan	6		1	-		1	3	50%
2	09	03	2,04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>PPH konsumsi ( angka kecukupan gizi)</b>	<b>skor</b>	<b>87</b>		<b>86</b>	85	<b>99%</b>	86.20	<b>86</b>	99%
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan penetapan target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	6	1						
						Target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	6		1	1	<b>100%</b>	1	3	50%
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya kegiatan pameran	kali	12	2						
						Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota bandar Lampung	kali	6	1						
						terlaksananya sosialisasi dan pembinaan penganekaragaman konsumsi Pangan	kali	12	1						
						jumlah pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman	laporan	12	2	2	10	<b>500%</b>	1	12	100%
2	09	04			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>persentase daerah Rawan Pangan</b>	<b>%</b>	<b>5</b>		<b>8</b>	8	<b>100%</b>	7	8	60
2	09	04	2,01		<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>persentase pemutakhiran peta analisis peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan</b>	dokumen	100		<b>100</b>	100	<b>100%</b>	100	<b>100</b>	100%
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	dokumen	2	1						
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	2		1	1		1	2	100%
2	09	04	2,02		<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah lokasi tertangani</b>	<b>kelurahan/kecamatan</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	2	<b>100%</b>	-	1	50%
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup	jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan ke masyarakat ( beras)	ton	24							

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME) KEGIATAN ( OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM ( RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 )	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN (n-3) TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 ( RENJA PADA TAHUN BERJALAN )	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s.d TAHUN BERJALAN ( -1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=7/8*100	10	11=6+8+10	12=11/5*100
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	5	1	1	1		1	2	40%
2	09	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar</b>	%	88		85.5	85.5	100%	85.5	86	97%
2	09	05	2.01		<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern</b>	%	88		85.5	85.5	100%	85.50	86	97%
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih , dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi	pelaku usaha PSAT ( sudah tersertifikasi maupun belum)	75	75						
					KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina		dokumen	6	1	1	1		1	3	50%
2	09	05	2.01	05	Penyelesaian Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	lokasi (Pasar tradisional dan )modern	8	8						
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		dokumen	6	1	1	1		1	3	50%

Bandar Lampung, 10 Januari 2023  
KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG

**I KADEK SUMARTHA, S.SOS., M.M.**  
NIP.19631125 198603 1 004